

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas, fenomena analisis dengan permasalahan penelitian ini maraknya kasus korban kekerasan terhadap anak yang mengalami peningkatan membuat tumbuh dan berkembangnya anak tidak berjalan baik, dengan fokus penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 27 yang difokuskan kepada bantuan hukum dan bantuan finansial dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 27 di Kabupaten Padang Lawas. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dan hambatan apa yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah sudah terlaksana melalui bantuan hukum dan bantuan finansial, bantuan hukum berupa pendampingan untuk korban anak selama proses perkara, mediasi dilakukan oleh pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepada anak, dan mendampingi anak bertemu dengan psikolog untuk pemeriksaan psikis anak, sedangkan bantuan finansial seperti biaya pemulihan korban dan keperluan/kebutuhan korban. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi yaitu kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan sehingga banyak masyarakat yang tidak paham dan minimnya anggaran sehingga penyediaan fasilitas tidak memadai. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pertama Pelaksana harusnya melakukan sosialisasi yang merata dan adil kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui mengenai Peraturan Daerah no 15 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada pasal 27 mengenai pelaksanaan kabupaten layak anak di Kabupaten Padang Lawas, kedua Pemerintah harusnya lebih mengutamakan dan memperhatikan anggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut untuk pembangunan fasilitas-fasilitas anak, ketiga aparat hukum lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat merasa dilindungi oleh negara, dan terakhir masyarakat harus ikut andil supaya peraturan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Regional Regulation number 15 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection in Padang Lawas Regency, the phenomenon of analysis with the problem of this research is the increasing number of cases of victims of violence against children which has made the growth and development of children not run well, with the focus of this research on the Implementation of Regional Regulation number 15 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection in article 27 which focuses on legal aid and financial aid and the obstacles faced in implementing regional regulation number 15 of 2014 concerning the implementation of child protection in article 27 in Padang Lawas district. Aims to find out how the implementation of the policy and what obstacles are faced. This study uses a descriptive qualitative research method with a method using data collection through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of regional regulations has been carried out through legal and financial assistance, legal aid in the form of assistance for child victims during the case process, mediation carried out by women and children protection (PPA) to children, and accompanying children to meet whit psychologists for child psychological examinations. While financial assistance such as victim recovery costs and victim needs. The obstacles faced in implementation are the uneven distribution of socialization carried out so that many people do not understand and the lack of budget so that the provision of facilities is not inadequate. The suggestions in this study are firstly, the implementer should conduct an even and fair socialization to the community so that the community can know about regional regulation no.r 15 of 2014 concerning the implementation of child protection in article 27 concerning the implementation of child-friendly districts in Padang Lawas regency, secondly, the government should prioritize and pay more attention to the budget in the implementation of the regional regulation for the construction of children's facilities, thirdly, the legal apparatus should focus more on providing services to the community so that the community feels protected by the state, and finally, the community must take part so that the regulation can run smoothly and children can live and grow well.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Child Protection